

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan pendidikan sangat bergantung pada komponen keuangan. Institusi pendidikan dapat menjalankan aktivitas pendidikan dengan baik apabila didukung dengan kondisi keuangan terjaga dengan baik. Kondisi ini dapat terealisasi apabila kebijakan manajemen keuangan sekolah dijalankan dengan tepat dan anggaran terserap secara optimal dan efektif. Sumber dana utama sekolah, secara umum berasal dari empat sumber yaitu: pemerintah, dana swadaya, masyarakat dan sumber lain. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan berasal dari masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah. Pernyataan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, dalam mengimplementasikan amanat UUD 1945, pasal 31 ayat (2) tentang pengalokasian 20% anggaran pembelajaran negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembiayaan pendidikan.

Wujud perealisasi anggaran pendidikan, selain digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan juga dialokasikan untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini telah dimulai sejak tahun 2010 dengan tujuan agar pembangunan dalam bidang pendidikan juga menjangkau masyarakat kelas menengah dan bawah. Pemerintah, dari tahun ke tahun, terus meningkatkan alokasi dana pendidikan. Berikut ini grafik alokasi dana APBN untuk pendidikan dari tahun 2017-2021.



Sumber: Kemenkeu (2021)

Gambar 1.1 Tingkat Anggaran Pendidikan dan Persentase Pertumbuhan Tahun 2017-2021 (Dalam Triliun Rupiah)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah alokasi anggaran pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Jumlah peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 19% dari tahun 2019 atau sejumlah Rp 547.8 Triliun. Peningkatan tersebut diakibatkan pandemic Covid-19 yang mengharuskan pemerintah memberikan subsidi kepada seluruh lembaga pendidikan dalam seluruh jenjang untuk menyelenggarakan pembelajaran secara online. Anggaran pendidikan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena pemerintah menetapkan kebijakan *refocusing* anggaran ke bagian kesehatan dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan laporan Kemenkeu ditemukan bahwa anggaran pendidikan tahun 2021 difokuskan untuk peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan skor PISA, penguatan penyelenggaraan PAUD dan peningkatan kompetensi guru (Kemenkeu, 2021).

Berikut anggaran pendidikan pada tingkat lokal Kota Medan dapat dilihat pada

Gambar 1.2 berikut.



Sumber: Kemendikbud (2021)

Gambar 1.2 Tingkat Anggaran Pendidikan dan Persentase Pertumbuhan Tahun 2016-2020 Kota Medan APBD Murni (Dalam Milliar Rupiah)

Sekolah-sekolah, selain memperoleh dana BOS juga menerima dana SPP dari siswa dan sumbangan masyarakat. Sekolah, dapat dikatakan berhubungan dengan keuangan dalam jumlah yang relatif banyak. Hal ini menuntut pihak sekolah untuk melakukan pengelolaan keuangan secara professional dan akuntabel.

Berbagai fenomena menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan beberapa sekolah masih jauh dari professional dan akuntabel. Situasi kacau balau pengelolaan keuangan sekolah tampak dari banyak yang mengelola keuangan tanpa disertai Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS). Sekolah memiliki RABS namun pengelolaan keuangan masih banyak tidak berdasarkan RABS (Endiawati, 2017).

Fenomena umumnya menunjukkan bahwa sekolah-sekolah belum memiliki sistem pengendalian internal yang efektif (Sari, 2018). Unit atau badan pengawasan

keuangan, kebanyakan hanya untuk memenuhi aspek legalitas formal. Kelemahan dalam pengendalian internal menjadikan sekolah rentan terhadap praktik korupsi. Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 2016 hingga 2021 menemukan korupsi di lingkup sekolah cukup memprihatinkan. Tahun 2006 sampai 2015, setidaknya ditemukan 242 kasus korupsi di lembaga pendidikan, meliputi penggelapan dana sebanyak 132 kasus, dengan total kerugian negara Rp. 518,7 milyar; dan *mark up* sebanyak 110 kasus, dengan total kerugian negara sebesar Rp. 448 milyar. Periode berikut, tahun 2016–2021 ditemukan 240 kasus korupsi di dunia pendidikan, dan menyebabkan merugikan negara sebesar Rp 1.6 triliun. Ade Irawan, Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, mengatakan bahwa masalah korupsi di sekolah terletak pada wilayah hubungan antara sekolah dengan dinas Pendidikan dalam penyalahgunaan anggaran (ICW, 2021).

Beberapa kejadian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan swasta, yang bernaung di bawah yayasan juga memiliki resiko kecurangan pengelolaan keuangan. Korupsi di sekolah swasta memang nyaris tidak terungkap, karena jarang dilakukan audit eksternal (Novelio, 2021).

Modus korupsi biasanya dengan penghilangan dokumen, kesengajaan kesalahan pencatatan dan manipulasi bukti-bukti seperti dokumen. Manipulasi laporan keuangan telah menjadi fenomena umum dalam dunia pendidikan. Kerapkali manipulasi laporan keuangan sengaja dilakukan untuk menutupi kecurangan.

Fenomena lain berkaitan dengan sumber pendanaan. Kebanyakan sekolah belum secara maksimal melibatkan masyarakat dalam pengembangan sekolah, terutama pada

aspek pembiayaan. Kebanyakan sekolah lebih membebankan pembiayaan kepada siswa dan wali murid. Hal ini membuat banyak sekolah unggul kerap kali menggunakan nama besar sebagai tameng untuk memungut biaya besar kepada siswa. Keadaan ini menjadi latar belakang banyak siswa miskin tidak mendapat tempat di sekolah berkualitas. Pihak sekolah juga menganggap pemasukan dari pihak orang tua siswa bukan termasuk uang negara, karena itu tidak perlu dimasukan ke rekening negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pada sisi lain sesungguhnya sekolah menggunakan fasilitas negara untuk melakukan pungutan dana masyarakat.

Sekolah-sekolah juga masih mengelola keuangan secara manual. Banyak sekolah belum siap mengelola keuangan dengan sistem digital, yang sesungguhnya lebih mudah dan efisien. Hal ini menyebabkan kerumitan tersendiri bagi audit keuangan.

Pengelolaan keuangan di sekolah-sekolah Katolik Kota Medan, berdasarkan hasil prasurvei terhadap 30 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di 15 sekolah tampak seperti pada table berikut.

Tabel 1.1 Hasil Pra-Survei Pengelolaan Keuangan Sekolah

No	Indikator	Baik	Tidak Baik
1	Transparansi	28 (93.3%)	2 (6.67%)
2	Akuntabilitas	20 (66.67%)	10 (33.33%)
3	Efektivitas	13 (43.33%)	17 (56.67%)
4	Efisiensi	12 (40%)	18 (60%)

Sumber: Hasil Prasurvei (2022)

Tabel 1.1 memperlihatkan terdapat 17 orang atau 56.67% tenaga pendidik beranggapan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan belum berjalan dengan baik. Beberapa tenaga

pendidik beranggapan bahwa anggaran sekolah terkadang tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan sehingga dilakukan *refocusing* pada elemen-elemen tertentu. Survey juga menemukan 18 orang atau 60% tenaga pendidik beranggapan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di sekolah belum mencapai level baik. Beberapa elemen anggaran tidak dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

Pelaporan keuangan menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan. Hasil prasurvei terhadap aktivitas pelaporan keuangan sekolah Katolik di Kota Medan menemukan bahwa proses pencatatan keuangan sekolah terdiri dari buku kas harian (penerimaan dan pengeluaran kas), serta laporan laba-rugi dan neraca. Berkaitan dengan laporan neraca, ditemukan beberapa sekolah belum memisahkan antara aset lancar dan aset tetap. Peneliti juga menemukan beberapa kekurangan lainnya, seperti tidak disajikan akumulasi penyusutan aset dan pemisahan antara kewajiban dan ekuitas yayasan. Kualitas laporan keuangan, seperti disampaikan oleh beberapa para peneliti banyak dipengaruhi oleh kompetensi manajerial, pengendalian internal, proses pengelolaan keuangan, karakteristik komite perusahaan dan sistem informasi akuntansi (Bawono et al., 2021; Hashad & Eissa, 2021; Hutagalung, 2018; Safari Gerayli et al., 2021; Setiyawati, 2013; Torres & Garcia-Lacalle, 2021).

Kondisi ini bermuara pada dua penyebab utama, yakni kelemahan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan. Banyak pihak mensinyalir bahwa pimpinan sekolah belum memiliki kompetensi manajerial yang memadai, dan pengelolaan keuangan yang belum akuntabel. Kompetensi manajerial yang belum memadai menyebabkan pengelolaan sekolah, termasuk pembiayaan tidak terlaksana secara profesional dan

akuntabel. Pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, penggunaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban belum dilakukan dengan kualitas yang memadai dan jauh dari pemenuhan aspek profesionalitas. Untuk itu, sekolah membutuhkan pimpinan yang berkompentensi dan memiliki sistem yang akuntabel, yang memungkinkan penciptaan berbagai unit usaha, membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah.

Berkaitan dengan perihal korupsi di lembaga pendidikan, seperti dikatakan beberapa peneliti bersumber dari kelemahan pimpinan dalam menerapkan sistem kerja dan sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Verle, et al (2014) menemukan bahwa kegagalan suatu organisasi menyelenggarakan aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan pimpinan tidak memiliki kompetensi manajerial (*managerial competencies*) yang memadai. Kompetensi manajerial merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pimpinan dalam mendaya gunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Shet & Pereira, 2021). Kepala sekolah selaku *education leader* memiliki tanggung jawab dalam mengatur, mengelola, melaksanakan dan mengendalikan anggaran sekolah untuk menunjang aktivitas belajar mengajar. Dalam lingkup Sekolah Katolik Kota Medan, hasil pra-survei terhadap 30 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menemukan penilaian kompetensi manajerial keuangan kepala sekolah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Hasil Pra-Survei Kompetensi Manajerial Keuangan Kepala Sekolah

No	Indikator	Baik	Tidak Baik
1	Kompetensi dalam perencanaan keuangan	12 (40%)	18 (60%)
2	Kompetensi dalam pengorganisasian Keuangan	19 (63%)	11 (36.67%)
3	Kompetensi dalam pelaksanaan keuangan	13 (43.33%)	17 (56.67%)
4	Kompetensi dalam pemberdayaan keuangan	16 (53.3%)	14 (46.67%)

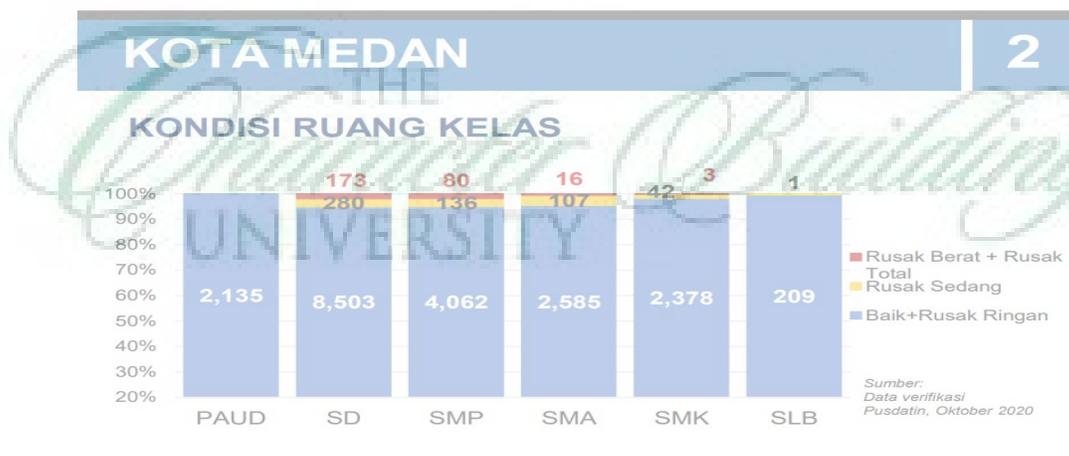
Sumber: Hasil Prasurvei (2022)

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa pada indikator perencanaan keuangan terdapat 18 orang tenaga pendidik atau 60% menyatakan tidak baik, dan 12 orang tenaga pendidik atau 40% menyatakan tidak baik. Hasil wawancara dengan beberapa responden yang menyatakan tidak baik, mengatakan bahwa kepala sekolah belum mampu mengalokasikan anggaran secara tepat yang mengakibatkan kelebihan pembiayaan. Penelitian Chen, et al (2021) ditemukan bahwa pemimpin yang tidak memiliki kompetensi manajerial yang memadai berdampak pada penurunan citra suatu organisasi, yang kemudian berdampak terhadap penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan dan kinerja pimpinan.

Selain kompetensi manajerial, pengelolaan keuangan sekolah juga dipengaruhi oleh pengendalian internal. Pelaksanaan pengendalian internal, pada sekolah swasta biasa dilakukan langsung oleh yayasan atau perangkat khusus yang bertugas melakukan audit dan pengendalian internal. Pelaksanaan pengendalian internal bertujuan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang kompeten, transparan dan efektif dalam mengelola keuangan. Hal tersebut dilakukan dengan penciptaan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 19 tahun 2007 tentang

Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mengamankan pengelolaan dana, baik dari pemerintah ataupun masyarakat harus dilakukan secara akuntabel dan transparan demi menghindari KKN. Penelitian yang dilaksanakan Chen, et al (2021) juga menemukan bahwa pelaksanaan pengendalian internal dapat berdampak positif bagi suatu organisasi, karena setiap aktivitas operasional dapat dikontrol supaya sesuai dengan standar dan sistem pengelolaan keuangan. Pengendalian internal juga dimaksudkan untuk menjaga supaya pengelolaan keuangan sesuai dengan rancangan alokasi anggaran.

Data menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di lembaga pendidikan, mulai dari level kementerian hingga sekolah ternyata belum dapat menjamin pengelolaan keuangan yang bebas masalah. Keberhasilan sistem pengendalian internal juga dilihat dari kemampuan sebuah organisasi dalam menjaga kondisi fasilitas pendukung kegiatan operasional, seperti ruang belajar dan ruang kegiatan lain untuk menunjang proses belajar mengajar. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi penilaian kondisi ruang kelas di Kota Medan Tahun 2020.



Sumber: Kemendikbud (2021)

Gambar 1.3 Kondisi Ruang Kelas di Kota Medan

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa terdapat ruang kelas yang masuk ke dalam klasifikasi rusak sedang-berat. Keadaan demikian paling banyak ditemukan pada ruang kelas sekolah dasar (SD). Selain itu juga ditemukan bahwa mayoritas sekolah yang memiliki ruang kelas terklasifikasi rusak sedang dan berat di sekolah negeri dan swasta. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan atau pengimplementasian sistem pengendalian internal di sekolah, terutama sekolah swasta belum optimal. Beberapa penelitian menemukan bahwa permasalahan tersebut kebanyakan terjadi karena kurang komitmen dalam penetapan standar fasilitas pendukung dan kurang efektif peran pengawas (Kartikawati, 2016; Savitri et al., 2020; Uwaoma & Ordu, 2015). Pengendalian internal pada sekolah swasta berstatus yayasan kebanyakan dilakukan oleh pihak-pihak yang ditugaskan oleh pengurus yayasan. Hal ini memperbesar risiko terjadi *conflict of interest* dan menunjukkan hasil yang jauh dari prinsip objektivitas. Hasil pra-survei yang dilakukan terhadap proses pengendalian internal di sekolah Katolik di bawah Keuskupan Agung Medan ditemukan hasil sebagai berikut.

Tabel 1.3 Hasil Pra-Survei Pengendalian Internal Keuangan Sekolah

No	Indikator	Baik	Tidak Baik
1	Lingkungan Pengendalian	25 (83.33%)	5 (16.67%)
2	Penilaian Risiko	14 (46.67%)	16 (53.3%)
3	Aktivitas Pengendalian	13 (43.33%)	17 (56.67%)
4	Informasi dan Komunikasi	27 (90%)	3 (10%)

Sumber: Hasil Prasurvei (2022)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa terdapat 16 orang tenaga pendidik atau 53.3% di sekolah-sekolah Katolik Kota Medan menanggapi proses penilaian risiko tidak dijalankan dengan baik. Hal ini disebabkan karena terdapat aspek yang belum dilaksanakan secara optimal, terutama pelaksanaan mitigasi risiko pelanggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah. Pra-survei juga menemukan 17 orang tenaga pendidik atau 56.67% menganggap proses aktivitas pengendalian internal di sekolah belum berjalan dengan baik. Para subjek menganggap kebijakan atau prosedur pengamanan aset sekolah belum dilaksanakan secara baik.

Topik ini banyak didalami oleh peneliti, seperti Savitri, et.al (2018) mengkaji tentang pengelolaan desa di Kabupaten Kampar. Savitri, dan kawan-kawan menemukan kompetensi kepemimpinan, sistem pengendalian internal, komitmen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Menurut Savitri, penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Kampar belum maksimal. Penyebab utama adalah kelemahan pada kualitas sumber daya manusia, kebocoran dana, kompetensi pemimpin, *Internal Control System (ICS)* dan komitmen organisasi. Kepemimpinan yang baik dapat mempengaruhi akuntabilitas *Village financial management (VFM)* sehingga dapat disimpulkan semakin baik kepemimpinan, semakin baik akuntabilitas VFM. Kepemimpinan, dapat dikatakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. ICS dapat dipastikan mempengaruhi akuntabilitas VFM. Pengaruh ICS pemerintah terhadap akuntabilitas VFM menjadikan ICS di setiap desa berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Pengendalian internal dapat meningkatkan akuntabilitas VFM.

Penelitian juga mengungkapkan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi akuntabilitas VFM. Semakin tinggi komitmen organisasi berdampak pada semakin baik akuntabilitas VFM. Temuan Savitri memberi sumbangan bagi pengembangan manajemen pengelolaan dana desa, namun hasil penelitian masih terbatas pada wacana, belum sampai pada aspek terapan, bagaimana kebaikan pemimpin dipahami, ditingkatkan, juga belum jelas kebaikan seperti apa. Apakah yang disebut kebaikan etis, kognitif atau intuitif, kemampuan manajerial, dan sebagainya? Aspek lain yang masih harus dikritisi adalah soal komitmen. Bagaimana komitmen dapat dibangun dan dikembangkan? Bagaimana mengembangkan komitmen anggota terhadap pengelolaan dana desa, yang nota bene bukan milik pribadi. Telah menjadi rahasia umum di negeri ini bahwa aparat memiliki persepsi bahwa peningkatan kinerja dan komitmen tidak akan berkontribusi bagi keuntungan langsung bagi mereka.

Penelitian Victor (2017) menemukan dampak dari tingkat kompetensi manajerial terhadap realisasi program. Victor menyampaikan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah mendukung aktivitas realisasi program kerja sekolah. Victor berhasil mengungkapkan keterkaitan antara kedua aspek ini, namun menurut hemat penulis, masih meninggalkan persoalan tentang bagaimana pengaruh ril kompetensi kepala sekolah pada pengelolaan sekolah, termasuk pada aspek keuangan, seperti penganggaran, hubungan dengan pihak-pihak terkait (seperti unit keuangan, staf dan departemen Pendidikan), dampak terhadap kinerja anggota, kemajuan siswa dan pengembangan sekolah. David, et. al (2019) menemukan bahwa pemahaman pimpinan tentang manajemen keuangan dan pengendalian internal berpengaruh secara

signifikan terhadap kinerja keuangan. David juga menyoroti keterlambatan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyampaikan Rencana Anggaran Kerja (RAK) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Propinsi Sulawesi Utara, serta kerendahan penyerapan anggaran. Penelitian ini masih meninggalkan persoalan yang belum terjawab yakni bagaimana pengendalian internal memediasi antara pemahaman pimpinan tentang manajemen keuangan terhadap kinerja manajemen keuangan, juga hubungan antara kompetensi kognitif pimpinan terhadap keterlambatan RAK dan SPJ, serta kerendahan penyerapan anggaran.

Shah juga menemukan bahwa kompetensi manajemen keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan sekolah, akan tetapi tidak menyampaikan sejauh mana pengaruh dan dampak terhadap kinerja organisasi dan pengembangan sekolah. (Shah, et. al, 2017). Kepala sekolah yang kurang berkompeten dalam manajemen keuangan berperan pada kelambanan pengembangan sekolah, sebaliknya kepala sekolah yang berkompetensi dalam manajerial berkontribusi pada pengembangan manajemen sekolah, seperti pengaturan *job description* staf keuangan, menata sistem, pelaporan, meskipun kerap kali cenderung terbatas pada pemenuhan formalitas akhir (Maqbool, et. al, 2017). Penelitian ini juga masih menyisakan persoalan tentang peran kompetensi manajerial kepala sekolah dengan pengembangan pengelolaan sekolah.

Chen, et. al, (2021) mengungkap hubungan antara kemampuan manajerial dan efisiensi investasi, serta dampak pengendalian internal terhadap kedua aspek ini. Ada lima poin utama yang menjadi temuan penelitian, yakni ¹⁾kemampuan manajerial

mengurangi penurunan investasi yang disebabkan asimetri informasi; ²)pengendalian internal dapat menahan hubungan antara kemampuan manajerial dan investasi yang berlebihan, tetapi mendorong hubungan antara kemampuan manajerial dan investasi yang kurang; ³)terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan manajerial dengan *over-investment*, dan ⁴)pengendalian internal memiliki pengaruh penekanan yang signifikan pada BUMN; ⁵)terdapat korelasi negatif secara signifikan antara kemampuan manajerial dan *under-investment*, serta pengaruh pengendalian internal terhadap promosi secara signifikan perusahaan milik swasta (Chen, *et. al.*, 2021). Peneliti juga berhasil merekomendasikan kepada pemerintah China untuk ¹)menyelesaikan *over investasi* yang menyebabkan kekurangan efisiensi investasi pada milik negara (BUMN); ²)mengkombinasikan secara sinergis antara mekanisme tata kelola (sistem pengendalian internal) dengan mekanisme perilaku (kemampuan manajerial); dan ³)mengintegrasikan kedua aspek ini dalam satu kerangka kerja; ⁴)mengalokasikan secara wajar untuk meningkatkan efisiensi investasi; ⁵)serta mempertimbangkan hak milik sebagai pemecahan masalah investasi yang tidak efisien. Penelitian menghasilkan temuan besar berkaitan dengan efisiensi investasi, kolaborasi sinergis antara kompetensi manajerial dengan sistem pengendalian internal, namun tetap menjadi persoalan bagaimana efisiensi itu dilakukan, dan bagaimana kolaborasi sinergis itu dapat diwujudkan.

Penelitian ini menerapkan pola pengukuran yang biasa digunakan perusahaan pada lingkungan sekolah, termasuk keterkaitan antara elemen dan tingkat pengaruh. Penelitian melakukan pengukuran tentang pengaruh kompetensi manajerial kepala

sekolah terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan. Penelitian juga melakukan pengukuran tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, kemampuan mediasi pengaruh kompetensi manajerial terhadap kualitas laporan keuangan, kemampuan mediasi pengelolaan keuangan pengaruh kompetensi manajerial terhadap kualitas laporan keuangan.

Kekhususan penelitian ini terletak pada sekolah sebagai lokus penelitian. Kekhususan lain adalah pengukuran terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan pengelolaan keuangan dalam memediasi kompetensi manajerial terhadap kualitas laporan keuangan. Kebanyakan peneliti cenderung mengukur pengaruh langsung antar elemen-elemen ini. Peneliti mencoba untuk mengungkap pengaruh tidak langsung antara elemen-elemen ini. Penggunaan *Structural Equational Model* (SEM) menjadi pembanding bagi para pengguna untuk melihat tingkat keakuratan dari masing-masing instrumen ini.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah yang terjadi di Sekolah Katolik di Kota Medan dan sekitar sebagai berikut:

1. Terjadi *trend* penurunan persentase alokasi dana pendidikan di tingkat nasional hingga hingga Kota Medan. Keadaan tersebut mengharuskan kementerian, dinas pendidikan di daerah dan sekolah-sekolah melaksanakan efisiensi anggaran agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasikan.

2. Berdasarkan hasil prasarvei yang dilaksanakan terhadap aktivitas pelaporan keuangan di Sekolah Katolik Kota Medan dan sekitar ditemukan proses pencatatan pada setiap sekolah dimulai dari pencatatan buku kas harian (penerimaan dan pengeluaran kas), laporan laba-rugi dan neraca. Laporan neraca, ditemukan beberapa sekolah belum memisahkan antara aset lancar dan aset tetap serta ditemukan beberapa kekurangan lain, seperti tidak disajikan akumulasi penyusutan aset dan tidak ditemukan pemisahaan antara kewajiban dan ekuitas yayasan.
3. Masih ditemukan kesalahan dalam aktivitas pengelolaan keuangan pendidikan dilevel sekolah, termasuk sekolah swasta. Keadaan tersebut membuat banyak rencana kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat terealisasi secara optimal.
4. Hasil pra-survei menemukan kekurangan kepala sekolah pada aspek kompetensi manajerial. Beberapa sekolah tidak memiliki perencanaan penganggaran dan pengelolaan dana yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh yayasan, termasuk yang berhubungan dengan perencanaan penganggaran untuk pengadaan fasilitas pendukung sekolah. Pra-survei juga menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja dari setiap guru secara aktual. Keadaan tersebut akan menimbulkan ketidاكلancaran pelaksanaan aktivitas di beberapa sekolah, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan sekolah.
5. Terdapat permasalahan pada penggunaan anggaran untuk peningkatan fasilitas

sekolah di Kota Medan, seperti kerusakan ruang kelas yang masuk ke dalam klasifikasi sedang-berat. Hal ini banyak ditemukan pada ruang kelas sekolah dasar (SD). Kondisi ruang kelas terklasifikasi rusak sedang-berat terjadi pada sekolah negeri dan swasta. Proses pengendalian internal pada sekolah swasta masih ditemukan kecenderungan *conflict of interest*.

1.3 Batasan Masalah Penelitian

Penelitian, demi efektivitas dan ketercapaian target dibatasi pada beberapa aspek berikut:

1. Lokus penelitian terbatas pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Kota Medan.
2. Sampel penelitian terbatas tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (pegawai) yang bekerja di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Kota Medan.
3. Penelitian hanya menguji pengaruh Kompetensi Manajerial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Sistem Pengendalian Internal dan Pengelolaan Keuangan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berpijak pada pembatasan masalah, penelitian merumuskan masalah kajian dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi manajerial memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi manajerial memiliki pengaruh terhadap sistem pengendalian internal?
3. Apakah kompetensi manajerial memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan?
4. Apakah sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah pengelolaan keuangan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
6. Apakah sistem pengendalian internal mampu memediasi pengaruh kompetensi manajerial terhadap kualitas laporan keuangan?
7. Apakah pengelolaan keuangan mampu memediasi pengaruh kompetensi manajerial terhadap kualitas laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi manajerial terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi manajerial terhadap sistem pengendalian internal.

3. Untuk menguji pengaruh kompetensi manajerial terhadap pengelolaan keuangan.
4. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian Internal terhadap kaulitas laporan keuangan.
5. Untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.
6. Untuk menguji peran sistem pengendalian Internal dalam memediasi pengaruh kompetensi manajerial terhadap kualitas laporan keuangan.
7. Untuk menguji peran sistem pengelolaan keuangan dalam memediasi pengaruh kompetensi manajerial terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan pengembangan penelitian yang berorientasi pada akuntansi manajemen, secara khusus instansi pemerintahan dan sekolah yang berfokus pada variabel kompetensi manajerial, pengelolaan keuangan, pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian juga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan model penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut pada organisasi *non-profit*.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini mampu berkontribusi memberikan *insight* kepada Yayasan katolik kota Medan untuk mengetahui tingkat kompetensi manajerial dari setiap kepala sekolah, disamping penelitian ini juga akan dapat menunjukkan implementasi pengendalian internal dan sistem pengelolaan sekolah, sehingga secara lebih jauh penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait tingkat kualitas laporan keuangan sekolah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pola pengaruh dari setiap variabel penelitian sehingga dapat membantu pihak Yayasan katolik kota Medan dalam merumuskan kebijakan penerapan dan penciptaan sistem manajemen keuangan yang baik di setiap sekolah.

